

PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGUATAN USAHA MIKRO DAN EKONOMI MASYARAKAT DI PROVINSI DKI JAKARTA

Elvis¹

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Corresponding email: elvis@ipdn.ac.id

Jurnal Politikologi 2020 volume 3 nomor 1

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi lokal merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat usaha mikro dan ekonomi masyarakat melalui kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait kebijakan dan program pemberdayaan usaha mikro di DKI Jakarta, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, penguat kapasitas, penghubung sumber daya, dan pencipta akses pasar. Program Jakpreneur menjadi salah satu instrumen penting melalui integrasi pelatihan, pendampingan, legalitas, pembiayaan, pemasaran, dan digitalisasi usaha. Namun, efektivitas pemberdayaan masih menghadapi tantangan berupa pemerataan akses, keberlanjutan usaha, peningkatan kapasitas, dan pengukuran dampak program. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal perlu diarahkan pada penguatan kemandirian dan keberlanjutan usaha melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan serta evaluasi berbasis dampak.

Kata kunci: Pemberdayaan ekonomi; Pemerintah daerah; UMKM; Pembangunan daerah

Pendahuluan

Pemberdayaan ekonomi lokal merupakan salah satu pendekatan penting dalam pembangunan daerah karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi yang tersedia di lingkungan lokal. Pembangunan ekonomi tidak semata-mata berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan agregat, tetapi juga menyangkut kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat kapasitas pelaku usaha, dan membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan (Blakely & Leigh, 2013). Dalam perspektif *local economic development*, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan pelaku ekonomi lokal berkembang melalui penyediaan infrastruktur, regulasi yang mendukung, pengembangan kapasitas, akses pembiayaan, serta perluasan pasar (Rodríguez-Pose & Tijmstra, 2007). Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi lokal perlu dipahami sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah

karena keberhasilan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam menghubungkan potensi lokal dengan peluang ekonomi yang tersedia.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki posisi penting dalam konteks tersebut karena berperan sebagai sumber mata pencaharian, penciptaan lapangan kerja, dan penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, keberadaan UMKM dalam jumlah besar tidak secara otomatis menunjukkan bahwa sektor tersebut telah memiliki daya saing dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah. Banyak pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam aspek kapasitas manajerial, inovasi, akses pembiayaan, legalitas usaha, teknologi digital, dan akses pasar. Penelitian mengenai pemberdayaan UMKM di Indonesia menunjukkan bahwa lambatnya perkembangan usaha kecil berkaitan dengan berbagai hambatan kapasitas dan lingkungan usaha yang belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan mereka (Kurniawati et al., 2021). Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah perlu bergerak melampaui pendekatan bantuan jangka pendek menuju penguatan ekosistem usaha yang memungkinkan UMKM tumbuh, beradaptasi, dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.

Dalam perspektif pemerintahan daerah, penguatan ekonomi lokal membutuhkan kapasitas pemerintah untuk bertindak sebagai *enabler* dan *facilitator*, bukan hanya sebagai regulator atau pelaksana program. Pemerintah daerah perlu membangun hubungan antara pelaku usaha, lembaga keuangan, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, perusahaan besar, dan pasar sehingga sumber daya pembangunan dapat dimobilisasi secara lebih efektif (Ansell & Torfing, 2021). Kapasitas tersebut menjadi semakin penting karena persoalan UMKM bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi pemerintah saja. Studi Triastuti (2021) menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kemampuan mengelola sumber daya dan akuntabilitas, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan lingkungan administratif dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, keberhasilan pemberdayaan ekonomi lokal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan berbagai sumber daya dan membangun tata kelola kolaboratif.

Konteks tersebut sangat relevan dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah metropolitan dengan karakteristik ekonomi yang kompleks dan tingkat aktivitas perdagangan serta jasa yang tinggi. Transformasi Jakarta menuju kota global menuntut adanya pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada investasi dan sektor ekonomi berskala besar, tetapi juga memastikan bahwa pelaku ekonomi lokal memperoleh kesempatan untuk berkembang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Dalam kebijakan anggaran daerah, pemberdayaan dan pengembangan UMKM diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing usaha lokal (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2024). Kebijakan pembangunan Jakarta juga menempatkan UMKM, inovasi, ekonomi digital, dan perluasan lapangan kerja sebagai bagian dari agenda akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2025).

Salah satu instrumen penting yang dikembangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Jakpreneur, yaitu ekosistem pembinaan kewirausahaan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas wirausaha agar lebih berdaya saing. Program tersebut melibatkan berbagai

perangkat daerah dan kolaborator dalam memberikan pendampingan, pelatihan, fasilitasi pemasaran, akses pembiayaan, dan pengembangan usaha (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2023). Pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan berbagai bentuk dukungan pemerintah ke dalam satu ekosistem pemberdayaan ekonomi. Namun, keberadaan program dan fasilitas belum dengan sendirinya menjamin bahwa seluruh pelaku usaha mampu memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal. Penelitian mengenai program pemberdayaan UMKM di Jakarta menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam konsistensi implementasi program serta kemampuan pelaku usaha memanfaatkan fasilitas pemerintah, khususnya dalam aspek literasi keuangan dan akses pasar (Rustanto & Rahardjo, 2021).

Perkembangan kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas akses pasar juga menunjukkan adanya perubahan orientasi pemberdayaan UMKM. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh penghargaan sebagai pemerintah provinsi dengan belanja produk UMK terbesar pada Tahun Anggaran 2024 dengan nilai lebih dari Rp13,7 triliun. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengadaan pemerintah dapat digunakan bukan hanya sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan permintaan terhadap produk lokal dan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2025). Pada 2026, Pemprov DKI Jakarta kembali memperoleh penghargaan terkait transaksi UMK terbesar untuk Tahun Anggaran 2025, dengan nilai transaksi mencapai Rp13,7 triliun, disertai kebijakan yang mencakup pembiayaan, pemasaran, peningkatan kualitas produk, pendampingan, digitalisasi, legalitas, dan akses terhadap pengadaan pemerintah (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah mulai menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk membangun ekosistem ekonomi lokal yang lebih inklusif.

Meskipun demikian, terdapat persoalan penting mengenai sejauh mana berbagai kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan pemberdayaan ekonomi dan bukan sekadar peningkatan jumlah program pemerintah. Pemberdayaan seharusnya menghasilkan perubahan pada kapasitas pelaku usaha, kemampuan mengakses pasar, kemampuan mengelola usaha, inovasi, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi. Penelitian mengenai program dukungan pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan kapasitas melalui intervensi kebijakan dapat meningkatkan daya saing UMKM, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesesuaian program dengan kebutuhan pelaku usaha dan kemampuan pemerintah membangun dukungan yang berkelanjutan (Sahputra & Hartanto, 2026). Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk melihat pemberdayaan UMKM dari perspektif pemerintahan, khususnya mengenai bagaimana pemerintah daerah mengelola berbagai instrumen kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan usaha mikro berkembang secara mandiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan usaha mikro dan ekonomi masyarakat. Penelitian secara khusus mengkaji bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi fasilitasi, peningkatan kapasitas, perluasan akses pasar, penguatan pembiayaan, digitalisasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung perkembangan UMKM. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu pemerintahan dengan memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah dapat menggunakan kebijakan pemberdayaan ekonomi sebagai instrumen pembangunan lokal. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

memperkuat ekosistem UMKM yang tidak hanya berorientasi pada jumlah pelaku usaha yang dibina, tetapi juga pada peningkatan produktivitas, daya saing, keberlanjutan usaha, dan kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan usaha mikro dan ekonomi masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan, bentuk intervensi pemerintah, pengalaman pelaku usaha, serta dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam pengembangan ekonomi lokal (Creswell & Poth, 2018). Desain studi kasus digunakan karena pemberdayaan ekonomi lokal merupakan fenomena yang berlangsung dalam konteks kelembagaan, sosial, dan ekonomi tertentu sehingga diperlukan analisis yang mempertimbangkan karakteristik spesifik Provinsi DKI Jakarta (Yin, 2018).

Lokasi penelitian adalah Provinsi DKI Jakarta dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro. Penelitian diarahkan untuk melihat bagaimana perangkat daerah menjalankan fungsi fasilitasi, pembinaan, pengembangan kapasitas, perluasan akses pasar, digitalisasi, serta akses terhadap pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Untuk memperoleh perspektif yang lebih beragam, penelitian dapat dilakukan pada beberapa wilayah administrasi yang dipilih secara purposif berdasarkan keberadaan aktivitas usaha mikro dan intensitas program pemberdayaan ekonomi. Unit analisis penelitian meliputi pemerintah daerah sebagai penyelenggara kebijakan dan pelaku usaha mikro sebagai kelompok sasaran pemberdayaan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal. Informan terdiri atas pejabat dan pelaksana pada perangkat daerah terkait, aparatur pada tingkat kecamatan dan kelurahan, pengelola program pemberdayaan, pengurus komunitas atau kelompok usaha, serta pelaku usaha mikro yang mengikuti program pemerintah daerah. Apabila diperlukan, teknik *snowball sampling* digunakan untuk mengidentifikasi informan tambahan yang memiliki informasi relevan. Pengumpulan informan dilakukan sampai diperoleh informasi yang memadai dan tidak lagi menghasilkan tema substantif baru (*data saturation*) (Creswell & Poth, 2018).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pertanyaan yang mencakup bentuk dukungan pemerintah, peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, akses pasar, pemanfaatan teknologi digital, legalitas usaha, serta keberlanjutan usaha. Observasi digunakan untuk memahami praktik pemberdayaan dan interaksi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha. Data sekunder diperoleh dari peraturan daerah, dokumen perencanaan pembangunan, laporan kinerja perangkat daerah, dokumen program Jakpreneur, data statistik UMKM, laporan pelaksanaan program, serta publikasi resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Data hasil wawancara ditranskripsikan, dikodekan, dan dikelompokkan berdasarkan tema yang telah ditentukan, yaitu fasilitasi pemerintah, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, akses pasar, digitalisasi usaha, dan keberlanjutan ekonomi. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi pola hubungan antara intervensi pemerintah dan perubahan kapasitas pelaku usaha mikro. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan perspektif pemerintah dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen (Creswell & Poth, 2018). Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif sejauh mana pemerintah daerah berperan dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha mikro di Provinsi DKI Jakarta.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator Ekosistem Ekonomi Lokal

Hasil kajian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemberdayaan ekonomi lokal mengalami pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada pemberian bantuan menuju pendekatan fasilitasi dan pengembangan ekosistem usaha. Pemerintah daerah tidak hanya ditempatkan sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor yang menghubungkan pelaku usaha mikro dengan sumber daya, informasi, pembiayaan, pasar, pendampingan, serta jejaring kelembagaan. Pergeseran tersebut sejalan dengan perspektif *local economic development* yang menempatkan pemerintah sebagai salah satu aktor penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha mengembangkan kapasitas ekonominya secara berkelanjutan (Blakely & Leigh, 2013; Rodríguez-Pose & Tijmstra, 2007).

Dalam konteks DKI Jakarta, fasilitasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan UMKM, termasuk Jakpreneur. Program tersebut mengintegrasikan berbagai bentuk dukungan yang mencakup pendataan, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pembiayaan, dan pengembangan usaha. Pendekatan integratif ini penting karena persoalan usaha mikro umumnya tidak berdiri sendiri. Keterbatasan modal sering kali berkaitan dengan rendahnya kapasitas manajerial, sementara keterbatasan pasar dapat berkaitan dengan kualitas produk, kemasan, legalitas, maupun kemampuan memanfaatkan teknologi digital.

Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan ekonomi lokal tidak cukup diukur dari jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau terdaftar dalam program pemerintah. Yang lebih penting adalah apakah intervensi tersebut mampu meningkatkan kapasitas produktif, memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, dan mendorong keberlanjutan usaha. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kapasitas pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas kebijakan pemberdayaan UMKM (Triastuti, 2021).

Penguatan Kapasitas Pelaku Usaha melalui Jakpreneur

Salah satu temuan penting adalah bahwa penguatan kapasitas menjadi komponen utama dalam strategi pemberdayaan ekonomi lokal di DKI Jakarta. Pelaku usaha mikro tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga pengetahuan mengenai manajemen usaha, pengembangan produk, pemasaran, pencatatan keuangan, digitalisasi, serta legalitas usaha. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk berkembang secara mandiri.

Jakpreneur dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan yang berusaha mengintegrasikan berbagai kebutuhan tersebut dalam satu ekosistem pemberdayaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak semata-mata memberikan sumber daya kepada masyarakat, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya tersebut. Kurniawati et al. (2021) menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan upaya membangun kemampuan pelaku usaha agar mampu menghadapi perubahan lingkungan ekonomi. Dalam konteks yang sama, penelitian Sahputra dan Hartanto (2026) menunjukkan bahwa program dukungan pemerintah daerah dapat berkontribusi terhadap pembangunan kapabilitas dan daya saing UMKM.

Namun demikian, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa pelatihan benar-benar menghasilkan perubahan perilaku dan kinerja usaha. Pelatihan yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada kebutuhan spesifik usaha berpotensi menghasilkan dampak yang terbatas. Karena itu, pendekatan pemberdayaan perlu bergerak menuju *needs-based empowerment*, yaitu pemberdayaan yang mempertimbangkan tingkat perkembangan, karakteristik produk, sektor usaha, kapasitas manajerial, serta persoalan yang dihadapi masing-masing pelaku usaha.

Akses Pembiayaan dan Perluasan Pasar

Dimensi berikutnya adalah akses terhadap pembiayaan dan pasar. Modal merupakan salah satu persoalan klasik yang dihadapi usaha mikro. Keterbatasan modal dapat menghambat pembelian bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, inovasi produk, dan ekspansi usaha. Akan tetapi, akses pembiayaan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan menyediakan kredit. Pelaku usaha juga memerlukan literasi keuangan, pencatatan transaksi, legalitas usaha, serta kemampuan menyusun perencanaan bisnis.

Dalam konteks DKI Jakarta, pemerintah daerah berperan sebagai penghubung antara pelaku UMKM dan berbagai institusi pendukung, termasuk lembaga keuangan dan organisasi lainnya. Pola tersebut memperlihatkan pentingnya *collaborative governance* dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah tidak mungkin menyediakan seluruh sumber daya secara langsung, sehingga kolaborasi dengan sektor perbankan, dunia usaha, perguruan tinggi, platform digital, serta organisasi masyarakat menjadi bagian penting dari ekosistem pemberdayaan.

Selain pembiayaan, akses pasar menjadi faktor yang sangat menentukan keberlanjutan usaha. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena dapat menciptakan pasar melalui promosi produk lokal, pameran, fasilitasi pemasaran digital, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan yang memberikan ruang lebih besar kepada produk UMKM dalam pengadaan pemerintah dapat menciptakan *guaranteed market* bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan keterhubungan antara kebijakan pemberdayaan ekonomi dan belanja pemerintah daerah.

Data kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa penguatan transaksi produk usaha mikro dan kecil melalui ekosistem pengadaan dan kegiatan promosi telah menjadi salah satu bagian penting dari strategi pengembangan UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dari sekadar membina pelaku usaha menuju upaya menciptakan ekosistem permintaan terhadap produk lokal.

Digitalisasi dan Formalisasi Usaha

Digitalisasi merupakan dimensi lain yang semakin penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal di DKI Jakarta. Karakteristik ekonomi perkotaan yang sangat kompetitif menuntut pelaku usaha untuk mampu menggunakan teknologi dalam pemasaran, transaksi, pengelolaan pelanggan, dan pengembangan jaringan bisnis. Digitalisasi dapat memperluas jangkauan pasar yang sebelumnya terbatas pada lingkungan geografis tertentu.

Namun, digitalisasi tidak dapat dipahami hanya sebagai penggunaan media sosial atau *marketplace*. Transformasi digital juga membutuhkan kemampuan mengelola informasi, memahami perilaku konsumen, menjaga kualitas produk, melakukan transaksi secara aman, dan memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan bisnis. Karena itu, program digitalisasi perlu dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas manajerial dan literasi usaha.

Pada saat yang sama, formalitas usaha seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha dan pemenuhan standar legalitas produk menjadi semakin penting. Formalisasi dapat meningkatkan akses terhadap pembiayaan, pasar formal, program pemerintah, dan jaringan bisnis. Dengan demikian, fasilitas legalitas bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan bagian dari strategi peningkatan daya saing usaha mikro.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Pembangunan Daerah

Secara lebih luas, pemberdayaan UMKM di DKI Jakarta menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah menciptakan kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Usaha mikro dapat menjadi instrumen untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memperkuat sirkulasi ekonomi di tingkat lokal.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki empat fungsi utama, yaitu fasilitator, penguat kapasitas, penghubung sumber daya, dan pencipta akses pasar. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan. Pelatihan tanpa akses pasar akan menghasilkan dampak terbatas; pembiayaan tanpa kapasitas manajemen dapat meningkatkan risiko usaha; sementara akses pasar tanpa peningkatan kualitas produk dapat mengurangi keberlanjutan usaha.

Dengan demikian, tantangan utama pemberdayaan ekonomi lokal di DKI Jakarta bukan semata-mata ketersediaan program, tetapi bagaimana memastikan integrasi antarkebijakan dan keberlanjutan dampaknya. Pemerintah daerah perlu menggeser ukuran keberhasilan dari jumlah program dan peserta menuju perubahan kapasitas, keberlanjutan usaha, peningkatan omzet, perluasan pasar, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap ekonomi lokal. Pendekatan

tersebut akan membuat pemberdayaan UMKM lebih substantif dan menjadikannya bagian dari strategi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Pemberdayaan ekonomi lokal di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem yang mendukung penguatan usaha mikro dan ekonomi masyarakat. Peran tersebut tidak lagi terbatas pada fungsi regulasi dan pemberian bantuan, tetapi berkembang menjadi fasilitator, penguat kapasitas, penghubung sumber daya, dan pencipta akses pasar. Melalui program seperti Jakpreneur, pemerintah berupaya mengintegrasikan pelatihan, pendampingan, legalitas usaha, akses pembiayaan, pemasaran, dan digitalisasi. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi akan lebih efektif apabila berbagai bentuk intervensi pemerintah dilaksanakan secara terintegrasi. Namun, tantangan masih terdapat pada keberlanjutan usaha, pemerataan akses program, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta pengukuran dampak program secara substantif. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah peserta atau kegiatan, tetapi perlu dilihat dari peningkatan kapasitas, keberlanjutan usaha, perluasan pasar, pendapatan, dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat pendekatan pemberdayaan yang berbasis kebutuhan dan karakteristik usaha. Pendampingan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek manajemen, pembiayaan, digitalisasi, legalitas, inovasi, dan pemasaran. Pemerintah juga perlu memperluas keterlibatan sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan komunitas dalam membangun ekosistem ekonomi lokal. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi perlu diarahkan pada indikator dampak, seperti keberlanjutan usaha, peningkatan omzet, perluasan pasar, dan penciptaan lapangan kerja.

References

- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector and rejuvenating democracy*. Cambridge University Press.
- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2013). *Planning local economic development: Theory and practice* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kurniawati, E., Idrus, S., & Suryanto, T. (2021). How does the government of Indonesia empower SMEs? An analysis of the social cognition found in newspapers. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 13(5), 765–790. <https://doi.org/10.1108/JEEE-04-2020-0087>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Rancangan awal RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). *APBD 2024: Perindustrian, perdagangan, dan UMKM (PPUKM)*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2025, July 23). *DKI Jakarta raih penghargaan sebagai Pemprov dengan belanja produk UMK terbesar 2024*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2025). *APBD Jakarta 2025*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2026, May 7). *Pemprov DKI raih penghargaan transaksi UMK terbesar pada Inabuyer B2B2G Expo 2026*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Rodríguez-Pose, A., & Tijmstra, S. A. R. (2007). Local economic development in sub-Saharan Africa. *Environment and Planning A*, 39(5), 1017–1038. <https://doi.org/10.1068/a3883>
- Rustanto, A. E., & Rahardjo, B. (2021). Analysis of increasing MSME empowerment through government services: The JakPreneur program in East Jakarta. *Sosiohumaniora*. <https://journals.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/50732>
- Sahputra, A. M., & Hartanto, A. D. (2026). Policy-driven capability building and MSME competitiveness: Evidence from a local government business support program in Indonesia. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 7(1). <https://doi.org/10.26905/jrei.v7i1.16918>
- Triastuti, M. R. H. (2021). Governance capacity of local government in empowering small and medium enterprises in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 402–431. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v2i2.37>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.